

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan publik merupakan salah satu perusahaan yang kepemilikannya terbuka untuk umum. Oleh karena itu, saham perusahaan dapat dimiliki oleh masyarakat secara luas. Salah satu hal yang penting dalam perusahaan publik adalah pengungkapan informasi, karena hal ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen perusahaan kepada *stakeholders* atau pemilik perusahaan. Informasi yang terbuka dari perusahaan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi *stakeholders* dalam pengambilan kebijakan perusahaan (Almilia dan Retrinasari, 2007). Informasi yang diberikan perusahaan kepada *stakeholders* biasanya dalam bentuk laporan tahunan.

Laporan tahunan merupakan media yang digunakan oleh perusahaan yang *go public* untuk mengkomunikasikan informasi kepada pihak luar manajemen (Hikmah dkk, 2011). Pihak-pihak luar manajemen yang mempunyai kepentingan dengan informasi dari perusahaan antara lain adalah investor, karyawan, kreditor, pelanggan, pemasok dan pihak lainnya yang bergantung pada pelaporan dan pengungkapan yang dilakukan perusahaan untuk membuat keputusan.

Cadbury (2000) dalam Hikmah, dkk (2011) menjelaskan tentang pentingnya pengungkapan *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan

tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti kreditur, supplier, asosiasi bisnis, konsumen, karyawan, pemerintah dan masyarakat luas (Hidayah, 2008). Pengungkapan *corporate governance* yang akurat, tepat waktu dan transparan dapat menambah nilai bagi para *stakeholders*. Sebaliknya, jika tidak ada pengungkapan yang memadai, para *stakeholders* tidak dapat meyakini bahwa kegiatan pengelolaan perusahaan oleh manajemen dilakukan dengan cara yang bijaksana dan hati-hati untuk kepentingan mereka.

Perhatian terhadap pentingnya *good corporate governance* baru terbentuk beberapa tahun terakhir, yang dipicu oleh kasus internasional seperti Enron, Worldcom, Tyco dan lain-lain (Kusumawati, 2007). Krisis ekonomi yang melanda Asia Timur pada akhir tahun 1997 telah memicu terjadinya diskusi tentang pentingnya sistem tatakelola dalam suatu negara. Iskander dan Chamlou (2000) dalam Hidayah (2008) menyebutkan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan negara lain bukan hanya disebabkan karena faktor ekonomi makro, tetapi juga karena lemahnya penerapan *good corporate governance* (GCG) yang ada di negara-negara tersebut, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan (auditing) yang belum mapan, pasar modal yang masih *under-regulated*, lemahnya pengawasan komisaris dan terabaikannya hak minoritas. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Johnson dkk (Darmawati dkk, 2005) yang menyebutkan bahwa lemahnya *corporate governance* sering disebut sebagai salah satu penyebab krisis keuangan yang

melanda beberapa negara-negara di Asia. Dengan demikian, *corporate governance* merupakan salah satu bahasan penting untuk mendukung pemulihan krisis ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil pada masa yang akan datang.

Di Indonesia, isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka setelah terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan pada pertengahan tahun 1997. Krisis tersebut menyebabkan terjadinya fluktuasi yang luar biasa pada nilai tukar rupiah terhadap nilai mata uang asing. Akibat dari krisis ekonomi tersebut adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1998 yang mencapai minus 13% (Lastanti, 2005). Indonesia mulai menerapkan prinsip *good corporate governance* sejak menandatangani *Letter of intent* (LoI) dengan *International Monetary Fund* (IMF) yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 1999 pemerintah melalui Kep-10/M.EKUI/08/1999 membentuk suatu lembaga yaitu Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). Komite ini bertugas untuk merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional tentang *corporate governance*, antara lain meliputi *Code for Good Corporate Governance* (Asba, 2009).

Tahun 2004, berdasarkan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004, KNKCG diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang meliputi Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Tahun 2006, BAPEPAM melalui keputusan Ketua Badan

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik menyatakan bahwa laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan *corporate governance* perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir. Peraturan ini berlaku untuk penyusunan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2006 (Rini, 2010).

Penelitian-penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Hikmah dkk (2011) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan. Umur listing perusahaan berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan. Kepemilikan dispersi, dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan.

Penelitian Rini (2010) menunjukkan bahwa besar perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Sedangkan umur listing perusahaan, kepemilikan dispersi, perusahaan multinasional dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan.

Penelitian Almilia dan Retrinasari (2007) menunjukkan bahwa rasio likuiditas, ukuran perusahaan dan status perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan tahunan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas serta hasil penelitian terdahulu yang masih beragam, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LUAS PENGUNGKAPAN CORPORATE GOVERNANCE DALAM LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN**”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi permasalahan pada faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan periode 2008-2011 pada perusahaan manufaktur yang termasuk dalam industri makanan dan minuman.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?
2. Apakah profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?

3. Apakah umur listing perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?
4. Apakah kepemilikan dispersi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?
5. Apakah ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?
6. Apakah perusahaan multinasional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh antara profitabilitas terhadap luas pengungkapan *corporate governance*
3. Untuk menganalisis pengaruh antara umur listing perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.
4. Untuk menganalisis pengaruh antara kepemilikan dispersi terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.
5. Untuk menganalisis pengaruh antara ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

6. Untuk menganalisis pengaruh antara perusahaan multinasional terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sarana penerapan teori yang di dapat dari Perguruan Tinggi ke dalam praktek untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan.

2. Manfaat Praktik

Manfaat praktik dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan yang baik.